

## SEWANYA CUMA RP 10.000 PER BULAN Diresmikan, Rusun Pangudi Luhur Tempat Tinggal Tunawisma

**BEKASI (IM)** - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia meresmikan Rumah Susun (Rusun) Sentra Pangudi Luhur di Jalan HM Joyomartono, Margahayu, Bekasi Timur, Jumat (10/2).

Usai diresmikan, rusun itu akan digunakan untuk masyarakat yang tak punya pekerjaan dan tak punya tinggal tetap. "Kalau di sini memang untuk pemulung, pekerja informal lain yang tidak memiliki rumah, tinggal di gerobak, atau di kolong jembatan," ujar Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini usai peresmian di lokasi, Jumat.

Risma menyebutkan, pembangunan rusun lima lantai diharapkan bisa mengatasi permasalahan banyaknya tunawisma. Adapun tiap unit hunian sengaja dibangun secara sederhana. Sebab, Risma ingin rusun itu memiliki banyak unit hunian agar mampu menampung lebih banyak warga miskin. "Kalau terlalu besar, nanti orang yang ditampung sedikit, padahal kebutuhannya terlalu besar. Jadi, kami menyesuaikan lahan," sebut Risma.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Su-

prijanto berharap fasilitas rusun itu bisa dimanfaatkan dengan optimal. Selain itu, pembangunan rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu diharapkan dapat mengentaskan permasalahan hunian.

"Kami ingin menyampaikan bahwa kami sangat berharap bahwa apa yang sudah dibangun, bisa dimanfaatkan," jelas Iwan.

### Rp 10 Ribu per Bulan

Para penghuni rumah susun (rusun) Sentra Pangudi Luhur di Jalan HM Joyomartono, Margahayu, Bekasi Timur, hanya dikenakan biaya Rp 10.000 per bulan untuk biaya sewa.

"Uang sewa Rp 10.000, karena perhitungan kami, mereka itu kebanyakan pemulung yang pendapatannya Rp 300.000 - Rp 600.000, jadi memang penghasilan mereka selama satu bulan seperti itu," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini usai peresmian.

"Sudah ada yang terdata itu 93 kepala keluarga (KK) terdiri dari disabilitas, kemudian lansia, mereka yang miskin, terlantar, dan tidak memiliki rumah. Tidak ada batasan usia, yang lansian akan kami sediakan unit di lantai paling dasar," jelas Risma. ● **yan**

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



## SHALAT GHAIB UNTUK TURKI DAN SURIAH DI MASJID ISTIQLAL

Umat Islam menunaikan salat Ghaib di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (10/2). Salat Ghaib diselenggarakan untuk mendoakan warga di Turki dan Suriah yang menjadi korban jiwa pada bencana gempa bumi yang melanda kedua negara tersebut.

## SEHUBUNGAN BERJALANNYA PROYEK MRT FASE 2

# Tak Ada Penutupan Jalan, Ini Rekayasa Lalin di Thamrin Mulai 12 Februari

Rekayasa lalin tersebut diterapkan terkait proyek Stage 1-4A. Pihak MRT akan mengerjakan power blender untuk perbaikan stabilitas tanah, pekerjaan dinding pembatas untuk konstruksi dinding diafragma sisi Barat-pulau Selatan, pekerjaan jet grouting untuk perkuatan tanah, instalasi king post stasiun sisi Barat, instalasi decking di sisi Timur.

**JAKARTA (IM)** - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) di sepanjang Jalan MH Thamrin. Rekayasa lalin diterapkan se-

hubungan berjalannya proyek MRT Fase 2 rute Stasiun Bundaran HI hingga simpang Harmoni.

Adapun lokasi pekerjaan yang berdampak pada rekayasa

sa lalin berada Jalan MH Thamrin mulai dari Bundaran Air Mancur Monumen Nasional atau Patung Kuda sampai Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia. Waktu pengerjaan dimulai pada 12 Februari hingga 15 Juni 2023.

"Untuk menunjang pekerjaan tersebut akan dilakukan rekayasa lalu lintas sesuai penantapan pekerjaan sebagai berikut," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Jumat (10/2).

Rekayasa lalin tersebut diterapkan terkait proyek Stage 1-4A. Pihak MRT akan mengerjakan power blender

untuk perbaikan stabilitas tanah, pekerjaan dinding pembatas untuk konstruksi dinding diafragma sisi Barat-pulau Selatan, pekerjaan jet grouting untuk perkuatan tanah, instalasi king post stasiun sisi Barat, instalasi decking di sisi Timur.

Rekayasa lalin akan diterapkan selama konstruksi berlangsung. Berikut rinciannya: - Lalu lintas dari arah barat (Tanah Abang) menuju arah timur (Senen) masih dapat melewati simpang Jalan Kebon Sirih-Jalan MH Thamrin Tugu Jam dialihkan melalui KH Wahid Hasyim dan seterusnya.

- Rute Angkutan Transjakarta 5M (Terminal Kampung Melayu-Tanah Abang) yang semula melintasi simpang Jalan Kebon Sirih-Jalan MH Thamrin Tugu Jam dialihkan melalui Jalan Budi Kemuliaan-Jalan Abdul Muis dan seterusnya.

- Rute Angkutan Transjakarta 1R (Terminal Senen-Tanah Abang) yang semula melintasi simpang Jalan Kebon Sirih-Jalan MH Thamrin Tugu Jam dialihkan melalui Jalan Budi Kemuliaan-Jalan Abdul Muis dan seterusnya.

- Lalu lintas dari arah timur Jalan Medan Merdeka Selatan yang akan menuju ke arah barat (Tanah Abang) yang semula melintasi simpang Jalan Kebon Sirih-Jalan MH Thamrin Tugu Jam dialihkan melalui Jalan Budi Kemuliaan-Jalan Abdul Muis dan seterusnya.

- Lalu lintas dari arah timur Jalan KH Wahid Hasyim yang akan menuju ke arah barat (Tanah Abang) yang semula melintasi simpang Jalan Kebon Sirih-Jalan MH Thamrin Tugu Jam dialihkan lurus melalui KH Wahid Hasyim dan seterusnya.

"Kami bahas sinergi rencana tata ruang dikaitkan dengan perpindahan kantor pemerintahan IKN," kata Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, dilansir dari *Antara*, Jumat (10/2).

Menurut Heru, Pemprov DKI akan mengakomodasi upaya Pemerintah Pusat terkait rencana pemanfaatan BMN setelah Jakarta tak lagi menyanggah status ibu kota. "Apa saja yang bisa kami akomodasi terkait pascapemindahan itu dikaitkan dengan rencana tata ruang di Jakarta," kata Heru. Adapun pengelolaan aset milik negara, lanjut Heru, sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.

Pemprov DKI ingin pemanfaatan aset negara itu bisa mendukung tata ruang agar pembangunan di Jakarta atau pun IKN Nusantara

seterusnya.

- Lalu lintas dari arah Selatan Jalan H Agus Salim yang akan menuju ke arah barat (Tanah Abang) yang semula melintasi simpang Jalan Kebon Sirih-Jalan MH Thamrin Tugu Jam dialihkan belok kiri melalui KH Wahid Hasyim dan seterusnya.

- Rute Angkutan Transjakarta 5M (Terminal Kampung Melayu-Tanah Abang) yang semula melintasi simpang Jalan Kebon Sirih-Jalan MH Thamrin Tugu Jam dialihkan melalui Jalan Budi Kemuliaan-Jalan Abdul Muis dan seterusnya.

- Rute Angkutan Transjakarta 1R (Terminal Senen-Tanah Abang) yang semula melintasi simpang Jalan Kebon Sirih-Jalan MH Thamrin Tugu Jam dialihkan melalui Jalan Budi Kemuliaan-Jalan Abdul Muis dan seterusnya.

Tak Ada Penutupan Jalan PT MRT Jakarta memastikan tak ada penutupan jalan selama proyek ini berlangsung. Sehingga sepanjang MH Thamrin arah Bundaran HI hingga Patung Kuda maupun sebaliknya tetap bisa dilewati.

"Tidak ada penutupan jalan, namun dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas tahap 1-4B yang secara umum memiliki konfigurasi jalur kendaraan yang sama dengan kondisi saat ini (tahap 1-4A)," kata Corsec MRT Jakarta Ahmad Pratomo saat dikonfirmasi, Jumat (10/2). ● **yan**

## TAK LAGI JADI IBU KOTA

# Dibahas, Pemanfaatan Aset BMN di DKI Jakarta Senilai Rp1.400 Triliun

**JAKARTA (IM)** - Pejabat Kementerian Keuangan menemui Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jumat (10/2). Pertemuan itu digelar untuk membahas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp1.400 triliun yang ada di Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.

"Kami bahas sinergi rencana tata ruang dikaitkan dengan perpindahan kantor pemerintahan IKN," kata Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, dilansir dari *Antara*, Jumat (10/2).

Menurut Heru, Pemprov DKI akan mengakomodasi upaya Pemerintah Pusat terkait rencana pemanfaatan BMN setelah Jakarta tak lagi menyanggah status ibu kota. "Apa saja yang bisa kami akomodasi terkait pascapemindahan itu dikaitkan dengan rencana tata ruang di Jakarta," kata Heru. Adapun pengelolaan aset milik negara, lanjut Heru, sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.

Pemprov DKI ingin pemanfaatan aset negara itu bisa mendukung tata ruang agar pembangunan di Jakarta atau pun IKN Nusantara

sama-sama berjalan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menjelaskan, nilai aset pemerintah pusat yang ada di DKI Jakarta diperkirakan mencapai Rp 1.400 triliun. Namun, tidak semua aset milik negara itu dapat dimanfaatkan karena aset yang digunakan oleh kementerian atau lembaga yang sifatnya vertikal tidak dipindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Dari Rp1.400 triliun itu diperkirakan ada Rp 300-400 triliun yang bisa dimanfaatkan karena untuk aset pemerintah pusat yang sifatnya vertikal tidak akan dipindah," katanya.

Kementerian Keuangan saat ini sudah menyiapkan rancangan utama pemanfaatan BMN tersebut agar memiliki nilai yang optimal. Nantinya, aset milik negara yang dapat dimanfaatkan itu rencananya digunakan untuk sewa atau kerja sama pemanfaatan aset.

"Terkait rencana pemanfaatan itu strateginya sangat tergantung dari tata ruang yang dibolehkan Pemprov DKI. Kami selaku pengelola karena aset itu adalah pemerintah pusat, kami akan memanfaatkan sebaiknya," imbuh dia. ● **yan**



FOTO: ANT

## KONSER WESTLIFE DI STADION MADYA GBK JAKARTA

Pekerja menata panggung jelang konser Westlife di Stadion Madya GBK, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Konser boyband asal Irlandia bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour 2023 Jakarta kan berlangsung pada hari ini, Sabtu, 11 Februari 2023.

## Kota Bekasi Kekurangan Ribuan Guru SD dan SMP

**BEKASI (IM)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sedang mendata, dan mendapati kekurangan tenaga pengajar atau guru di sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN). Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mencatat, setidaknya tingkat SD dan SMP membutuhkan tambahan ribuan guru.

"Kita kekurangan guru SD sebanyak 1.671 dan SMP 850 lebih," kata Kepala Disdik Kota Bekasi, Uu Saiful Mikdar, Jumat (10/2).

Uu mengatakan, kekurangan guru di Kota Bekasi sudah terjadi sejak 2019. Sampai saat ini, sambung dia, belum ada tambahan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengisi kekosongan di seluruh sekolah SD dan SMP Kota Bekasi. "Kekurangan guru di kita ini memang sudah lama sekitar empat tahun ke belakang," katanya.

Menurut Uu, Disdik Kota Bekasi sudah menyampaikan kekurangan guru itu kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia menyebut, penempatan rekrutmen PPPK menjadi urusan pemerintahan pusat. "Kami menyampaikan informasi-informasi terkait situasi dan kondisi termasuk kekurangan guru," katanya.

Dia mencatat, Pemkot Bekasi memiliki guru tenaga kerja kontrak (TKK) atau honorer sebanyak 4.900 lebih. Pemkot mendata,

mempunyai 356 SD dan 56 SMP, yang semuanya masih kekurangan guru.

Uu mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, jajarannya memusulkan menambah beban kerja guru menjadi 50 jam setiap minggunya. Meski menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, beban kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran minimal 24 jam tatap muka setiap pekan.

"Jalan keluarnya meski menurut ketentuannya itu minimal ngajar 24 jam. Nah, karena kekurangan ini terpaksa ada yang mengajar di atas 50 jam," kata Uu.

Dia mengaku, terpaksa menambah beban kerja guru daripada peserta didik tidak mendapatkan pengajaran dari guru. Uu memastikan, sebenarnya permasalahan kekurangan tenaga pengajar untuk tingkat SD dan SMP bukan terjadi di Kota Bekasi saja, tetapi terjadi di seluruh daerah. "Saya kemarin main ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga sama. Jadi secara umum sama," kata Uu.

Dia mengatakan, salah satu penyebab guru sekarang langka adalah karena beda dengan kebijakan pemerintah pusat pada masa Presiden Soeharto. Saat itu, semua lulusan dari sekolah keguruan menjadi PNS. "Guru yang masuk menjadi PNS pada masa itu (saat ini) sudah banyak yang pensiun dan juga meninggal dunia," kata Uu. ● **yan**

## Heru Budi Pertimbangkan Hidupkan Kembali Operasi Yustisi di Ibu Kota

**JAKARTA (IM)** - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali operasi yustisi bagi para pendatang di Ibu Kota. "Iya, nanti dilihat ya," ucapnya singkat, di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (10/2).

Untuk diketahui, operasi yustisi adalah tindakan hukum untuk membina penduduk. Operasi ini biasa digelar di permukiman yang ramai oleh pendatang usai Lebaran.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyebut jajarannya hingga kini belum berencana menerapkan operasi yustisi. "Sampai saat ini belum ada," ujarnya melalui pesan singkat.

Disdukcapil DKI, menurut Budi, sedang menggelar program pembinaan penduduk kepada

masyarakat. Katanya, program itu berupa sosialisasi layanan dokumen kependudukan dari Disdukcapil DKI. Adapun bentuk layanan dokumen kependudukan tersebut di antaranya seperti pembuatan KTP elektronik, pembuatan kartu keluarga, pembentukan kartu identitas anak, hingga pembuatan akta kelahiran.

"Yang kami lakukan saat ini adalah melakukan program pembinaan kependudukan ke masyarakat," ungkap Budi.

"Program pembinaan kependudukan, kami melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat terkait seluruh layanan dokumen kependudukan dan dibarengi dengan kegiatan layanan jemput bola," sambung Budi.

Untuk diketahui, pada 2019, eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengganti nama operasi yustisi menjadi layanan bina kependudukan. Ia mengata-

kan tak mau lagi menggunakan istilah "operasi".

"Saya tidak mau menggunakan istilah operasi lagi, tidak operasi. Sekarang adalah pelayanan bina kependudukan," kata Anies.

Anies mengaku tak ingin membuat Jakarta tertutup bagi pendatang dengan menggunakan istilah "operasi".

Menurut dia, siapa pun berhak mengadu nasib di Jakarta. Pemprov DKI hanya memastikan pendatang tak akan terkatung-katung. Anies akan melanjutkan operasi yustisi dengan nama yang berbeda. "Kita meminta kepada RT, RW, bila ada warga baru untuk dicatat, lapor, dan dicatat kependudukannya sehingga kita tahu siapa yang berada di Jakarta," ujarnya.

Anies meminta para pendatang datang dengan pengalaman dan keterampilan. Selain itu, ia meminta mereka sudah terdaftar BPJS. ● **yan**



FOTO: ANT

## KETERANGAN PERS KEPALA BRIN

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko memberikan keterangan pers pada acara BRIN Laksawab di Jakarta, Jumat (10/2). Dalam keterangan pers tersebut Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memberikan klarifikasi atas beberapa isu seperti desakan pencopotan kepala BRIN, penggunaan anggaran serta penutupan lokasi kerja BRIN di daerah.